

## **KAPASITAS BIROKRASI MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS DIGITALISASI DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PEMERINTAHAN DAERAH**

Denizar Putra Handa Rohmadi, Universitas Terbuka  
Iqbal Aidar Idrus, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email : denizputra14@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pelayanan berbasis digitalisasi sangat membantu pelaksanaan kinerja birokrasi dan meningkatkan SDM dalam memahami pengelolaan digitaisasi di pemerintahan. Sejalan dengan itu , otoritas pemerintah harus dapat memperluas dominasi informasi teknologi dan SDM yang berimajinatif serta mengharapkan berbagai masalah formal dan kasual dengan menggunakan inovasi cerdas yang umumnya digunakan di ruang publik, untuk memperkuat efisiensi kerja. Untuk memahami birokrasi yang cepat dan sigap dalam menawarkan jenis bantuan publik, diperlukan perubahan mendasar. Selain itu, keselarasan perubahan peraturan harus dipertahankan untuk bekerja pada sifat administrasi publik dan memberikan kepercayaan publik pada otoritas pemerintah, sehingga bagian dari bantuan publik terkait SDM dengan perubahan peraturan. inovasi, serta peningkatan administrasi dan otoritas. Proses administrasi elektif yang layak, mengenai ilmu birokrasi teknologi efektif dan lugas adalah kerangka pemerintahan elektronik dengan perspektif granular. Merencanakan perbaikan dengan menitik beratkan pada pelatihan dan persiapan, perubahan dan kemajuan, serta mengisi lowongan yang membutuhkan tenaga ahli berpengalaman dengan menggunakan inovasi merupakan suatu siklus yang merupakan bagian penting dari perencanaan SDM dan sikap mental yang tidak tertandingi dalam perangkat SDM pemerintahan daerah itu sendiri.

**Kata kunci** : Kapasitas Birokrasi, Aplikasi Digitalisasi, dan Sumber Daya Manusia

### **ABSTRACT**

Digitalization-based services greatly assist the implementation of bureaucratic performance and improve human resources in understanding the management of digitization in government. In line with that, government authorities must be able to expand the dominance of information technology and imaginative human resources and expect various formal and casual issues by using smart innovations that are generally used in public spaces, to strengthen work efficiency. To understand the fast and agile bureaucracy in offering this type of public assistance, fundamental changes are needed. In addition, the alignment of regulatory changes must be maintained to work on the nature of public administration and give public confidence in government authorities, so that part of the HR-related public assistance with regulatory changes. innovation, as well as increased administration and authority. An appropriate elective administrative process, regarding the science of effective and straightforward technological bureaucracy is an e-government framework with a granular perspective. Planning improvements with an emphasis on training and preparation, change and progress, as well as filling vacancies that require experienced experts using innovation is a cycle that is an important part of HR planning and a mental attitude that is unmatched in the regional government HR apparatus itself.

**Keywords:** Bureaucratic Capacity, Digitalization Applications, and Human Resources

## PENDAHULUAN

Percepatan penggunaan dukungan digitaisasi government yang luas dan ekstensif mengakibatkan implementasi salah satu reformasi birokrasi. Oleh karena itu, transformasi digitalisasi pelayanan publik harus disertai dengan pergeseran cara pandang. Hal ini mutlak diperlukan, tidak hanya untuk memindahkan layanan secara online atau ke aplikasi digital, tetapi juga untuk melakukan perubahan pada SDM. Personil yang kompeten dan berkualitas biasanya dapat dipercaya setiap saat dan akan menggunakan keahliannya secara maksimal. Untuk mencapai tujuan organisasi, tahap awal tata kelola SDM sektor publik sebanding dengan yang ada di sektor swasta dan melibatkan penerapan perencanaan SDM yang tepat dan akurat. Tata kelola SDM juga berperan penting dalam memastikan keberhasilan reformasi birokrasi di wilayah pemerintahan. Divisi kerja sumber daya manusia kemudian menyusun rencana kerja organisasi berdasarkan perencanaan sumber daya manusia.

Proses yang merupakan komponen penting perencanaan SDM dan sikap mental unggul dalam aparatur SDM itu sendiri adalah perencanaan pengembangan dengan menitikberatkan pada pendidikan dan pelatihan, transisi dan promosi, serta pengisian lowongan yang membutuhkan tenaga ahli yang berpengalaman dengan menggunakan teknologi. Maka dari itu disinilah kepala pemerintahan memanfaatkan pegawai yang mana,

pegawai tersebut bisa dipekerjakan dengan cara diberikan arahan mengenai penggunaan ilmu teknologi. Hal ini dilakukan sesuai dengan tugas dan kegiatan yang diemban. Agar siap menghadapi perubahan yang semakin cepat yang diperlukan untuk membangun masyarakat berpengetahuan, departemen sumber daya manusia di berbagai lembaga publik perlu melakukan transformasi dan peningkatan kemahiran dalam manajemen sumber daya elektronik, kepemimpinan manajerial, literasi digital, dan penelitian. Tujuan dari hal tersebut adalah dimana pegawai pemerintahan yang awalnya tidak mengetahui ilmu teknologi menjadi tahu bagaimana cara penggunaan ilmu teknologi berbasis digital.

Menurut Deakin (2012), kemajuan inovasi data telah memasuki berbagai bagian kehidupan, khususnya perdagangan data bagi suatu asosiasi atau organisasi pemerintah untuk melakukan kewajibannya dalam menawarkan jenis bantuan ke daerah setempat. Kemajuan teknologi informasi secara signifikan mempengaruhi perluasan sektor bisnis; Pertama, kapasitas penyimpanan data, analisis, pengambilan, dan proses manajemen menjadi lebih informal sesuai kebutuhan telah ditingkatkan oleh teknologi informasi. Alhujran dkk. (2011) mengatakan bahwa hal ini berpengaruh pada sistem produksi. sumber daya manusia dan proses pelayanan yang lebih mampu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan sendiri.

Kedua, prosedur pemantauan sangat dipengaruhi oleh teknologi. Dengan pengecualian beberapa teknologi, pengawasan sistem selalu menjadi kemungkinan, dan teknologi memungkinkan. Menurut Weill & Olson (1989), "teknologi informasi" mencakup semua teknologi yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengubah, dan memanfaatkan informasi dalam segala bentuknya. Tidak ada masalah dengan penggunaan sistem teknologi informasi berbasis komputer dalam kegiatan pemerintah yang intens saat ini; Bagaimanapun, pemanfaatan inovasi yang tidak tepat akan membawa kemalangan moneter dan non-moneter yang mengejutkan (Bryzek, 1996). Karena memilih bagaimana menggunakan sistem teknologi secara tepat sesuai kebutuhan aktivitas kerja di pemerintahan bukanlah keputusan yang mudah, penggunaan sistem teknologi untuk mendukung aktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan tetap berpotensi merugikan bisnis itu sendiri.

Teknologi informasi (TI), seperti yang didefinisikan oleh Henderson & Venkatraman (1999), adalah bidang ilmu yang berfokus pada pengelolaan sistem informasi berbasis komputer. Di bidang informasi dunia bisnis, TI dapat memenuhi persyaratan SDM secara tepat waktu, terkait, dan cara yang akurat. Selain swasta, sektor publik memanfaatkan TI untuk memberikan layanan kepada masyarakat khususnya seperti membuat dokumen perencanaan, mengajukan izin, dan

membuat informasi untuk profil regional. Pemerintah, seperti bisnis, berjuang dengan implementasi TI (Henderson & Venkatraman, 1999). Internet semakin mendukung perkembangan ini, dan tampaknya, selama manusia mau memulai komunikasi terbuka, mereka akan dapat berkomunikasi dengan siapa pun di dunia tentang topik yang menjadi minat bersama dan bahkan berbagi pengalaman, kesulitan, dan kesenangan. Teknologi perangkat lunak juga berkembang pesat. Perangkat lunak yang hanya mementingkan pemenuhan kebutuhan fungsional di masa lalu berubah menjadi perangkat lunak yang tidak hanya fungsional tetapi juga ramah pengguna dan mudah digunakan (Leidner & Kayworth, 2006). Akibatnya, kompleksitas perangkat lunak, jumlah pengguna, dan ukuran perangkat lunak meningkat. Perangkat lunak yang dapat digunakan pengguna dengan lebih mudah sebenarnya lebih sulit untuk dibuat. Pemrogram dan pengguna dapat mengembangkan perangkat lunak yang hanya memerlukan sedikit fungsionalitas untuk kerja. Perangkat lunak dengan kompleksitas yang signifikan harus dikembangkan oleh tim yang menggunakan teknik khusus dan memanfaatkan berbagai keterampilan.

Peningkatan kemampuan berpikir aparatur birokrasi sangat penting untuk meningkatkan kompetensi. Dalam kaitan ini, aparatur birokrasi perlu berupaya untuk secara terus menerus dan simultan memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya guna mengakomodasi kebutuhan tersebut. tertarik pada birokrasi

dan menjawab pertanyaan dari berbagai pihak mengenai pelaksanaan pekerjaan birokrasi. Perspektif yang didasarkan pada nilai-nilai bersama diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang didasarkan pada norma ilmiah konseptual dan standar pemahaman, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bekerja dalam perspektif erat kaitannya dengan otoritas ilmu pengetahuan dan inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa aparat birokrasi lebih cenderung meningkatkan kompetensinya yang mana semakin tinggi kualitas pengetahuan dan teknologi yang dikuasai.

Suatu sistem organisasi pemerintahan yang dikenal dengan istilah birokrasi memiliki tugas yang sangat kompleks yang tentunya memerlukan pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi pemerintahan yang efektif. Menurut Weber, birokrasi dibentuk atas dasar netral, bebas dari campur tangan pihak-pihak yang dapat merugikannya melalui kekuatan politik. Dengan kata lain, birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan netral yang berfungsi sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut negara itu didirikan. Netralitas birokrasi menjadi penting secara inheren dalam memenuhi kebutuhan banyak orang tanpa memihak kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor publik dilayani secara efektif dan efisien oleh siapa pun yang memimpin negara birokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Kantor Pemerintahan Keerom, Wilayah Papua dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif menitik beratkan pada bagian-bagian strategi evaluasi pelaksanaan yang representatif pada tahun 2022. Investigasi ini antara lain menggunakan studi tertulis, studi lapangan, dan ujian. Metode Kualitatif digunakan dalam prosedur pemeriksaan informasi. Metode ini digunakan dengan pengaturan untuk menilai kualitas, kekurangan, dan kelebihan. Metode Kualitatif adalah komponen yang dapat digunakan untuk secara sengaja mengidentifikasi sebuah organisasi. Tujuan akhir tersebut adalah untuk mempelajari cara mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berikut hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Aplikasi Berbasis Digital Menghadapi Dinamika Sumber Daya Manusia yang terdapat di daerah Kantor Bupati Keerom Papua di pimpin oleh Peter Gusbager adalah untuk memahami organisasi yang cepat dan ringan dalam menawarkan jenis bantuan publik, diperlukan perubahan utama. Selain itu, perkembangan perubahan peraturan harus terus dilakukan untuk bekerja pada sifat administrasi publik dan memberikan kepercayaan publik pada otoritas pemerintah, sehingga bagian bantuan publik terkait erat dengan perubahan administratif. inovasi, serta peningkatan administrasi dan otoritas. Proses administrasi elektif yang

layak, mahir dan mudah adalah kerangka pemerintahan elektronik dengan perspektif granular.

Untuk mendorong kemajuan bantuan masyarakat khususnya di daerah Keerom yang memperhatikan pemanfaatan inovasi data, pembangunan diharapkan dapat menyesuaikan dengan perubahan dan menumbuhkan SDM yang layak bagi aparatur pemerintah. mengingat kerinduan masyarakat akan organisasi yang lugas dan bertanggung jawab serta kondisi ekologis yang semakin tidak pasti. Jadi perubahan regulasi berbasis e-administrasi, yang meliputi penciptaan pengembangan, pemupukan kerja sama dan kolaborasi, serta menjawab perubahan alami yang cepat, dapat menghidupkan kembali organisasi. Demikian pula arah administrasi publik yang terletak di daerah Keerom tidak hanya menambah pekerjaan pada presentasi organisasi tetapi juga muncul sebagai bagian penting dalam perbaikan administrasi peraturan pemerintah di kemudian hari. Selanjutnya, sehubungan dengan peningkatan peningkatan sumber daya manusia yang dapat dipertahankan di daerah Keerom, otoritas pemerintah harus memiliki opsi untuk membangun dominasi informasi dan inovasi dan secara imajinatif mengharapkan berbagai masalah formal dan kasual dengan menggunakan inovasi pengetahuan yang telah digunakan secara luas di area publik, untuk meningkatkan efisiensi kerja.

Untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik, perubahan dan peningkatan kinerja pemerintah diperlukan.

Untuk menjawab perubahan dan peningkatan penyelenggaraan dan penyelenggaraan penyelenggaraan legislasi yang lebih baik, maka otoritas publik diharapkan dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraannya. Menurut Yasminingrum (2013), pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan dimensi kapasitas, moral, yang selama ini banyak terabaikan dan hanya sedikit dibanahi. Tingkat kepemimpinan yang mampu membangun kepentingan moral harus menjadi titik awal untuk pengembangan aparatur pemerintah. Dimensi aparatur yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memerlukan unsur-unsur mendasar, seperti unsur Keandalan aktor dan penyelenggara pemerintahan, tidak diragukan lagi berimplikasi pada good governance dan clean governance.

Maka dari itu, penggunaan inovasi kesadaran buatan manusia akan sangat membantu dalam mendapatkan data melalui pengumpulan informasi yang dapat menjadi alasan untuk navigasi dan peningkatan sistem komputerisasi di kemudian hari. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong dan menginspirasi unit pelayanan untuk menggunakan sumber dayanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanannya dan terpilih sebagai Unit Pelayanan Percontohan yang dapat diikuti oleh unit pelayanan lainnya.

Program stimulasi peran sumber daya manusia berbasis ekonomi dan teknologi

informasi dilaksanakan untuk mendorong masyarakat dan pemerintah desa mewujudkan seluruh potensi desanya dan menghasilkan nilai ekonomi. program kegairahan lebih eksplisit sudut pandang hortikultura dan sumber daya manusia. Perekonomian masyarakat desa terutama ditopang oleh sektor pertanian, dan pemerintah desa, pemuda, dan masyarakat umum semua membutuhkan teknologi informasi. Untuk sumber daya manusia, teknologi informasi berfungsi sebagai sarana pemutakhiran informasi, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat memenuhi tuntutan masa kini. Kewenangan inovasi data harus menjadi signifikan bagi pemerintah kota dan individu daerah, mengingat jarak yang signifikan antara kota dan otoritas publik modal. Dalam jangka panjang, pengetahuan masyarakat tentang info teknologi informasi dapat digunakan untuk usaha produktif, seperti pemasaran media digital hasil pertanian (Rahardjo, 2006).

Karena kepatuhan hukum terhadap pembentukan Birokrasi Berbasis Digital partisipatif dari masyarakat dapat mendukung terwujudnya perubahan kehidupan masyarakat, maka partisipasi masyarakat Keerom dalam hal peningkatan pembangunan Kabupaten Keerom menjadi sangat penting. Kabupaten itu sendiri terbentuk dan berkembang, baik secara ekonomi maupun sosial dengan berlandaskan ilmu hukum. Alhasil, seluruh lapisan masyarakat di kabupaten keerom, mulai dari karang taruna hingga pejabat Kabupaten Keerom, terlibat penuh dalam

proyek pengabdian masyarakat ini dengan saling berbagi dan aktif berdiskusi tentang persoalan birokrasi yang yang dihadapi masyarakat serta cara mengatasinya.

## **KESIMPULAN**

Kapasitas Birokrasi Melalui Aplikasi Berbasis Digital dalam Menghadapi Dinamika Sumber Daya Manusia di Pemerintahan menunjukkan bahwa penerapan sistem semakin mendukung perkembangan tersebut. Tampaknya manusia akan dapat berkomunikasi dengan siapa pun di dunia asalkan mau memulai komunikasi terbuka. Tentang hal-hal yang menarik satu sama lain dan bahkan membicarakan kegembiraan, tantangan, dan pengalaman yang mereka alami. Teknologi perangkat lunak juga berkembang pesat. Menurut Leidner & Kayworth (2006), perangkat lunak telah bergeser dari yang hanya mementingkan pemenuhan persyaratan fungsional menjadi ramah pengguna dan mudah digunakan. Aplikasi adalah penggunaan komputer, menurut Jogiyanto (1999 :12), dimana instruksi atau instruksi disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat mengolah masukan menjadi keluaran. Ada dua jenis aplikasi perangkat lunak yang dibuat untuk tugas tertentu: a. perangkat lunak khusus, yang mencakup program dengan instruksi bawaan untuk tugas tertentu. b. Bundel aplikasi perangkat lunak sebuah program yang dikemas dengan dokumentasi untuk memecahkan suatu jenis masalah tertentu. Oleh karena itu, proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi adalah teknologi manajemen sumber daya manusia. Perencanaan dan perekrutan tenaga kerja, pekerja seleksi dan penempatan, pendidikan dan pelatihan, integrasi dan retensi (termasuk kompensasi), evaluasi kinerja dan pengembangan karir, dan rekrutmen staf dan audit penghentian atau kegiatan penutupan adalah bagian dari proses ini. Menurut Hakim (2014), sumber daya manusia (SDM) adalah istilah ilmiah untuk studi tentang bagaimana suatu organisasi mengelola penggunaan sumber daya manusianya. Selain itu, tujuan dari studi ini adalah untuk menemukan solusi atas masalah penerapan teknologi ini secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. kepada pemerintah daerah.

Sebagai penutup laporan ini peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh pemerintah demi mencapai kebutuhan Sumber Daya Manusia yang maksimal mengenai Penggunaan Kapasitas Berbasis Digital : Untuk memulainya, kepercayaan publik harus dibangun kembali dengan memodifikasi dan meningkatkan kinerja pemerintah. Kedua, pemerintah didorong untuk menemukan cara-cara baru dalam merencanakan pembangunan dengan berfokus pada pendidikan dan pelatihan, transisi dan promosi, serta mengisi lowongan yang diperlukan untuk membantu masyarakat. move forward. Ketiga, Melaksanakan pengembangan melalui rencana kerja implementasi Sumber Daya Manusia oleh

tenaga ahli yang berpengalaman dalam menggunakan teknologi merupakan proses yang merupakan bagian penting dari perencanaan SDM dan sikap mental unggul pada aparatur Sumber Daya Manusia itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, H., & Si, M. (n.d.). Retrieved from [http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210487014/6362Dinamika\\_MSDM.pdf](http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210487014/6362Dinamika_MSDM.pdf)
- Hernita, S. (2018). Meningkatkan Kinerja Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Melalui Penguasaan Teknologi Informasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(2), 57-65.
- Madonna, M., Reza, F., & Novrian, N. (2021). Pembekalan Penguasaan Media Digital Bagi Penyuluh Kesehatan Dalam Upaya Membangun Ketahanan Kesehatan Warga Jakarta Selatan. *Bengawan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 65-74.
- Manajemen tata kelola aset tetap pemerintah daerah kabupaten situbondo menuju opini wajar tanpa PENGECUALIAN (WTP)*. (n.d.). Retrieved October 29, 2022, from <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/82170/ALIFAH%20MAULI%20YUWANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Rusfiana, Y. (n.d.). *MEMAHAMI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGAN*. Retrieved from [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/601/1/3.%20BUKU\\_BIROKRASI%20Pemerintahan%20dan%20PERKEMBANGANNYA.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/601/1/3.%20BUKU_BIROKRASI%20Pemerintahan%20dan%20PERKEMBANGANNYA.pdf)
- Segara, L. D. (2017). Analisis Determinan Good Government Governance serta Implikasinya pada Kualitas LAKIP. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 1261-1276.
- Strategi, J., & Azhari, A. (2017). *Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Berjiwa Wira Usaha dalam Menghadapi Dinamika Global*. 5(1). [https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/83775/F.%20ISIP\\_Jurnal\\_Abdul%20Kholiq\\_Kapasitas%20Aparatur%20Pemerintah.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/83775/F.%20ISIP_Jurnal_Abdul%20Kholiq_Kapasitas%20Aparatur%20Pemerintah.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Fadhlurrohman, M. I. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27-42.
- Teori Birokrasi Weberian*. (n.d.). Retrieved from <https://eprints.umm.ac.id/55786/3/BAB%20II.pdf>
- Retrieved from <https://eprints.umm.ac.id/82661/3/Aplikasi>. (n.d.). Retrieved from [https://repository.atmaluhur.ac.id/bitstream/handle/123456789/489/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Jogiyanto%20\(1999%3A12\)](https://repository.atmaluhur.ac.id/bitstream/handle/123456789/489/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Jogiyanto%20(1999%3A12))